



**TREN DEMOGRAFI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENDIDIKAN**

Aip Syarifudin
Universitas Muhammadiyah Cirebon
aip.syarifudin@umc.ac.id

Abstrak

Tren demografi saat ini ramai dibahas oleh hampir semua kalangan. Sebagai sebuah luaran dari multidisiplin ilmu, tentunya demografi ini akan berkaitan erat dengan berbagai hal yang lainnya. Dengan konsep demografi maka akan dapat dilihat bagaimana perpindahan penduduk di wilayah tertentu disertai dengan berbagai macam persoalannya. Perpindahan penduduk ini berdampak banyak terhadap hal yang lainnya. Pengendalian kependudukan menjadi salah satu upaya dalam mendesain daerah yang kondusif serta mampu memiliki kesejahteraan yang baik.

Salah satu hal yang jelas akan terdampak atau lebih tepatnya saling mempengaruhi adalah pendidikan. Demografi dengan pendidikan merupakan hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Pendidikan bisa didesain dengan mempertimbangkan aspek demografi. Sebaliknya, demografi akan berubah salah satunya dengan adanya faktor perbedaan pendidikan di satu wilayah dengan wilayah lainnya. Maka aspek pemerataan adalah salah satu cara agar terjadi pengendalian demografi dan juga pemerataan dalam aspek pendidikan.

Kata Kunci :

Demografi, pendidikan

PENDAHULUAN

Sudah menjadi hukum alam yang bisa diteoretiskan, setiap negara di belahan dunia mengalami perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Dinamisasi ini mesti terjadi berdasarkan hukum alam yang berlaku. Pertumbuhan penduduk tidak sama pada berbagai tempat, begitu pula di setiap daerah, provinsi, atau kota yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perubahan jumlah penduduk salah satunya diakibatkan oleh migrasi, dimana mereka yang ingin mendapatkan pendidikan yang tidak ada di tempat tinggal mereka sebelumnya dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, juga dari para pencari lapangan kerja yang berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar jumlah sekolah, guru, sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah dipengaruhi tergantung kebanyakan orang berpendidikan rendah atau tinggi, misalnya di suatu negara kebanyakan pendidikannya rendah, berarti kualitas sumber daya manusianya rendah.

Dalam membuat perencanaan pendidikan dibutuhkan alat-alat untuk bisa mendapatkan informasi, salah satunya adalah informasi demografi juga akan menentukan dalam penentuan pendidikan yang bertepatan guna dan berdaya guna. Demografi bisa dilihat dari berbagai cara, misalnya dengan sensus penduduk, sensus pendidikan, sensus ekonomi dan lain sebagainya.

Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses dalam perumusan kebijaksanaan suatu instrumen dan teknik dalam penentuan prioritas dan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa, serta merupakan jembatan penghubung yang akan menyelaraskan tujuan pendidikan dengan harapan orang tua dan cita-cita anak didik.

Dari uraian pendahuluan di atas, kita bisa melihat bahwa demografi dan pendidikan adalah dua hal yang saling mempengaruhi, maka penulis tertarik untuk lebih detail membahas tentang demografi dan pendidikan, maka artikel ini berjudul ***“Tren Demografi dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan”***.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Demografi

Sesuai dengan kerangka berfikir ilmiah, maka segala sesuatu bisa dikupas dan ditinjau dari aspek *etimologi*, *epistemologi*, *ontologi*, dan *aksiologi*. Kerangka berfikir itulah yang mampu membuat suatu hal menjadi lebih berguna dan bisa dijadikan sebagai dasar dari penentuan kebijakan atau landasan pemikiran. Dalam pengertian yang sempit, menurut Arifin (2007:3), demografi didefinisikan sebagai demografi formal (demografi teknik). Demografi formal berbicara jumlah, distribusi, struktur dan perubahan penduduk. Jumlah menunjukkan banyaknya penduduk, distribusi menunjukkan penempatan penduduk dalam suatu ruang pada suatu kurun waktu tertentu, secara geografis atau berbagai macam daerah tempat tinggal, struktur dalam pengertian yang sempit mencakup distribusi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dan perubahan mencakup penambahan atau pengurangan pada jumlah penduduk atau salah satu unit dari struktur penduduk.

Demografi, dalam pandangan etimologi berasal bahasa Latin, kata "*demographie*" terdiri dari dua kata yaitu *demos* dan *graphien*, *demos* artinya

penduduk dan *graphien* berarti catatan, bahasan tentang sesuatu. Secara etimologi makna demografi adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. (Rizqi Dwi Alfiyanto, 2015).

Menurut Arifin (2007:4), demografi merupakan istilah yang berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *graphein* yang berarti menggambar atau menulis. Dengan demikian, demografi diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan migrasi. Demografi mencakup kajian ilmiah tentang jumlah, persebaran geografis, komposisi penduduk, serta bagaimana faktor-faktor itu berubah dari waktu ke waktu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk atau dengan kata lain segala hal ihwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut seperti adanya kelahiran, adanya kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu.

Epistemologi demografi bisa dilihat dari cara ilmiah untuk bisa membahas tentang demografi, misal saja ada yang

disebut dengan sensus, pemetaan penduduk dan lain lain. Maka efistimologi dari demografi adalah sistematika dan konten demografi itu sendiri dalam aspek pengetahuan dan sebagai sebuah disiplin ilmu. Secara ontologi, demografi bisa dikatakan sebagai perubahan kependudukan. Perubahan ini yang kemudian menjadi aksiologi dari demografi, nilai guna, daya manfaat dari perubahan penduduk ini akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, misal pendidikan dan juga ekonomi ataupun yang lainnya.

Ilmu demografi digunakan oleh para ahli mencakup empat tujuan utama, yaitu:

1. Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu, mengukur distribusi kesempatan tenaga kerja, distribusi persebaran penduduk dan merencanakan lokasi sekolah.

2. Menjabarkan pertumbuhan penduduk masa lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia.

3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya politik, lingkungan keamanan dan fungsi organisasi sosial.

4. Mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang dan mempelajari cara mengatasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. (Rizki Dwi Alfiyanto, 2015)

Dari keempat tujuan pokok tersebut di atas akan bermanfaat untuk melakukan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan pendidikan, kesejahteraan sosial, pajak, kemiliteran, perumahan, pertanian dan lain-lain. Jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Khususnya penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan sehingga jumlah penduduknya terus mengalami peningkatan. besarnya pertumbuhan penduduk tidak selalu sama, hal ini terbukti dari hasil sensus yang telah dilakukan beberapa kali di Indonesia. Kelahiran akan menambah jumlah penduduk tentunya, sedangkan kematian akan mengurangi jumlah penduduk. Selain itu, migrasi juga sangat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Migrasi masuk juga menjadi salah satu hal yang akan menambah jumlah penduduk, sedangkan migrasi keluar akan mengurangi jumlah penduduk.

Menurut Usman, (2008:74), susunan penduduk sering dilakukan berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, pendidikan, tempat tinggal dan sebagainya. Struktur penduduk sangat diperlukan dan berguna untuk program perencanaan pembangunan di masa yang akan datang, beberapa susunan penduduk antara lain:

1. Susunan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi Penduduk Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih banyak dari usia dewasa, jumlah penduduk bertambah dengan cepat.

2. Susunan Penduduk Menurut Tempat Tinggal

Susunan penduduk menurut tempat tinggal dapat ditentukan menurut tempat tinggal penduduk bersangkutan, apakah di desa atau kota. Susunan penduduk menurut tempat tinggal dapat dijadikan bahan perencanaan bidang pembangunan.

3. Susunan Penduduk Menurut Pendidikan

Susunan penduduk dalam konteks pendidikan adalah klasifikasi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang diperolehnya. Jenjang pendidikan biasanya diklasifikasikan mulai dari yang tidak bersekolah sampai perguruan tinggi.

4. Susunan Penduduk Menurut Lapangan Kerja/Usaha

Susunan penduduk menurut pekerjaan menunjukkan jenis usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pada saat ini pemerintah sudah dapat merencanakan tambahan sekolah dan guru sekolah dasar yang diperlukan. Dengan perencanaan tersebut diharapkan agar penduduk berumur 0-4 tahun itu kelak ketika memasuki usia sekolah akan dapat tertampung di sekolah dasar. Jenjang pendidikan biasanya diklasifikasikan mulai dari yang tidak bersekolah sampai perguruan tinggi. Susunan penduduk menurut pendidikan dapat menjadi pedoman kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah atau negara. Bila sumber daya manusia di negara tersebut kebanyakan pendidikan rendah, berarti kualitasnya juga rendah.

2. Trend Demografi dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan

Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar jumlah sekolah, guru, sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Hasil dari demografi ini akan di jadikan dasar atau pedoman dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Faktor-faktor demografi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk membantu dalam perumusan kebijakan misalnya

menentukan besar anggaran untuk bidang pendidikan. (Firman Asmendri, 2015:98).

Dari hal itu, ada daerah-daerah yang memiliki beberapa faktor yang menyebabkan penduduknya semakin cepat bertambah padat. Ketidakmerataan kepadatan penduduk, dari segi pembangunan menjadi tidak baik, maka salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu dengan pemerataan pendidikan sampai ke daerah pedalaman untuk mengurangi arus migrasi ke pusat-pusat pendidikan dengan suatu perencanaan yang matang agar lembaga pendidikan dengan banyaknya penduduk bisa saling mendukung satu sama lainnya.

Menurut Priyono Tjiptoherijanto (1989:57), dalam bukunya Afifuddin “Perencanaan Pendidikan” menyebutkan bahwa, terdapat hubungan yang signifikan antara perkembangan pendudukan dan perkembangan pendidikan. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan dinamis dan berkelanjutan, pokok-pokok pemikirannya menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber alam dan sumber daya manusia dengan cara menyesuaikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang tersedia

dengan lembaga pendidikan yang dibutuhkan. Secara implisit, pengertian ini mengandung makna beberapa aspek berikut:

a. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan didukung oleh sumber daya alam dengan kualitas lingkungan dan manusia semakin berkembang.

b. Sumber alam, terutama udara, air, dan tanah memiliki ambang batas sehingga pemanfaatan yang berlebihan akan menyebabkan berkurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya alam serta mengurangi kemampuannya mendukung kehidupan umat manusia.

c. Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, sehingga semakin baik mutu kualitas lingkungan terutama lembaga pendidikan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup.

d. Sustainability pembangunan memungkinkan generasi saat ini meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi peluang bagi generasi masa depan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Skema pembangunan yang sustainable memberikan dampak adanya batas yang bukan batas absolut, tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial, yaitu sumber daya alam serta kemampuan biosfer menyerap berbagai pengaruh dari aktivitas manusia.

Selain itu teknologi dan organisasi dapat dikelola dan dapat ditingkatkan guna memberi jalan bagi era baru dalam pembangunan untuk lembaga pendidikan.

Strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud mengembangkan keselarasan antara umat manusia dengan alam. Proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, serta perubahan kelembagaan diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi penduduk serta sumber daya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu. (Priyono Tjiptoherijanto, 1989:59)

Menurut Sarbini dan Lina (2011:189), pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus. *Pertama*, pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. *Kedua*, pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata.

Pada waktu menetapkan pembangunan lembaga pendidikan ada dua pertimbangan yang kadang kala saling bertentangan dan harus menjadi pusat perhatian yaitu jumlah penduduk suatu wilayah dan daerah pelayanan lembaga pendidikan yang

bersangkutan. Di suatu wilayah haruslah terdapat anak didik dalam suatu jumlah minimum tertentu untuk dapat membenarkan dibangunnya sebuah lembaga pendidikan. (Ta Ngoc Chau, 1986:37). Masalah ini bertambah sukar pada kasus pembangunan sebuah lembaga pendidikan lanjutan yang mempunyai lebih banyak mata pelajaran, baik yang wajib maupun yang bersifat pilihan. Yang penting adalah bahwa daerah yang dilayani oleh lembaga pendidikan tidak demikian luas, sehingga para anak didik dapat mencapainya dengan mudah dari rumah masing-masing.

Namun bagaimanapun, haruslah dipahami bahwa dalam menentukan lokasi lembaga pendidikan tidak boleh didasarkan hanya atas pertimbangan teoretis belaka. Perencanaan lokasi lembaga pendidikan harus mempunyai gambaran yang tepat tentang masalah yang mungkin dihadapinya di kemudian hari. Secara khusus harus mengetahui trend kependudukan di tahun-tahun yang akan datang, alat pengangkutan, dan faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya dan semua faktor ini dapat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Semua faktor ini diketahui paling baik oleh penduduk pada tingkat lokal dan sepanjang masih memungkinkan para pejabat setempat

harus dilibatkan sepenuhnya dalam menetapkan lokasi lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan itu merupakan salah satu sistem yang dikelilingi oleh lingkungannya yang terdiri atas bermacam-macam sistem yang disebut dengan suprasistem. Sistem dalam suprasistem memiliki kaitan secara erat dan rapi, saling memberi dan saling menerima. Sistem-sistem yang ada di lingkungan ini perlu dipertimbangkan oleh para perencana pendidikan karena selalu akan memberi pengaruh pada tujuan perencanaan pendidikan itu sudah direalisasikan. (Firman Asmendri, 2015:99).

Selain itu juga, masyarakat sangat berperan besar untuk keberlangsungan suatu lembaga pendidikan, sebagai mana menurut Wahjoetomo (2009:42), masyarakat adalah sekumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat memiliki cita-cita, peraturan, dan sistem kekuasaan tertentu.

Sebelum membuat suatu lembaga pendidikan tentu harus ada planning dan ada dua tahap yang dapat dibedakan dalam menyusun peramalan di kemudian hari. Tujuan peramalan demikian antara lain untuk memperkirakan biaya pendidikan dan merencanakan cara-cara pembiayaannya. Angka-angka yang menjadi pokok pembahasan dalam hal ini

ialah angka-angka yang bersifat menyeluruh (*over-all figures*), dan inilah yang dinamakan peramalan angka pendaftaran masuk sekolah pada skala nasional. (Ta Ngoc Chau, 1986:79).

Apabila permasalahannya adalah pelaksanaan suatu rencana pendidikan, maka perlu diketahui bagaimana penyebaran pendaftaran masuk sekolah di berbagai daerah dari seluruh negara. Dengan sendirinya hal ini akan menyangkut pula peramalan pada skala nasional dan skala lokal, antara lain-:

1) Skala Nasional

Pertama-tama yang harus dilakukan dalam hal ini ialah mengadakan perkiraan dalam penduduk usia sekolah. Dengan dasar kelahiran yang telah terdaftar dan kelahiran yang diperkirakan, suatu usaha dilakukan untuk mengadakan estimasi dalam jumlah penduduk usia sekolah. (Nanang Fatah, 2001:37)

Selama masa usia wajib belajar, peramalan angka-angka pendaftaran masuk sekolah di suatu negara yang mempunyai sistem efektif dalam wajib belajar, kurang lebih ekuivalen dengan penduduk usia sekolah. Namun pada tingkat lain laju pendaftaran mungkin berlainan. Laju pendaftaran terakhir ini bergantung pada dua faktor pokok di satu pihak ia bergantung pada permintaan masyarakat (*social demand*, ialah keinginan dari pihak

anak didik dan orang tuanya), dan di pihak lain, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam kenyataannya, semua ini tidaklah semudah seperti yang disebut di atas, Pemerintah betapapun otokratiknya, mau tidak mau harus memperhitungkan permintaan masyarakat dalam menentukan kebijakannya. Sebaliknya, betapapun liberalnya sebuah pemerintah tidak akan melepaskan usaha untuk mempengaruhi permintaan masyarakat itu. (Abdul Ramat, 2014:56). Misalnya, banyak negara dilakukan usaha untuk menitikberatkan bahan mendorong pendidikan teknik atau pengajaran dalam subjek ilmiah. Dengan demikian, hasil kombinasi antara dua faktorlah permintaan masyarakat dan kebijakan pemerintah yang menentukan tingkat laju pendaftaran pendidikan.

Bercermin dari trend di masa lalu sering kali memberikan pandangan yang membuka pikiran, berdasarkan laju-laju di masa lalu itu, maka dapat disusun tingkat yang mungkin akan tercapai untuk kedepannya. Sehubungan dengan itu, apabila pengembangan pendidikan ditetapkan sebagai tugas prioritas atau dengan kata lain dilakukan usaha untuk memperlancar pengembangannya sampai jangkauan yang sebesar-besarnya, maka laju pendaftaran masuk sekolah akan merupakan suatu sasaran yang harus dapat

dicapai. Misalnya, mungkin telah ditetapkan bahwa laju pendaftaran masuk sekolah harus ditingkatkan secara bertahap supaya dalam 20 tahun sudah mencapai tingkat belajar.

Apabila penduduk usia sekolah kedepannya telah diketahui berdasarkan proyeksi-proyeksi kependudukan dan apabila sedapat-dapatnya laju pendaftaran masuk sekolah pada berbagai tingkat telah diperkirakan, maka akan sangat mudah untuk membuat peramalan dalam jumlah anak didik. Namun, seperti telah dikemukakan terlebih dulu, untuk pelaksanaan suatu rencana pendidikan tidaklah cukup dengan hanya peramalan angka menyeluruh bagi sebuah negara. Perlu juga diketahui, bagaimana penyebarannya di seluruh negara. Dengan demikian, setelah membuat peramalan pada skala nasional maka perlu juga menyusun peramalan sejenis pada skala lokal.

2) Skala Lokal

Pada skala lokal akan timbul serangkaian masalah dalam laju pendaftaran masuk sekolah dapat berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Sebagaimana telah dikemukakan dalam hubungan dengan lokasi sekolah, dalam masalah ini tentu tergantung kepada keputusan pejabat-pejabat pemerintah apakah perbedaan-perbedaan yang ada itu

akan dikurangi atau sebaliknya, pendidikan dikembangkan lebih lanjut di daerah-daerah yang terdapat permintaan yang paling besar. (S. Sagala, 2009:54).

Perpindahan penduduk dalam negeri pun harus diperhitungkan pula, apabila migrasi internasional pada umumnya mempunyai dampak yang sedikit pada penduduk usia sekolah, gerakan perpindahan dalam negeri yang sering kali meliputi jumlah yang besar dapat mempunyai dampak yang besar. Peningkatan penduduk di kota-kota besar dan kecil disebabkan baik oleh perpindahan penduduk maupun oleh pertumbuhan penduduk secara alamiah. Sangat disayangkan bahwa pada umumnya perpindahan penduduk semacam ini tidak tercatat secara baik dan biasanya tidak terdapat data yang tepat baik mengenai asal maupun usia penduduk yang pindah. Bahkan jumlah seluruh perpindahan ini pun hanya sewaktu-waktu dikalkulasikan, khususnya pada waktu dilakukan sensus. Dengan demikian dapatlah difahami bahwa suatu peramalan dalam perpindahan penduduk di dalam negeri hanya sekedar suatu pendekatan saja.

Gerakan perpindahan dari pusat-pusat perkotaan ke daerah pinggiran kota merupakan suatu ciri khas dari negara-negara maju. Namun gerakan perpindahan dari daerah pedesaan ke kota-kota besar

dan kecil atau urbanisasi sekarang menjadi ciri semua negara, baik yang telah maju maupun yang sedang berkembang, dan gerakan inilah yang mempunyai dampak terbesar pada pengembangan pendidikan.

Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan penduduk dalam negeri sebagian besar terletak di tingkat lokal daya tarik kota-kota besar dan kecil pada daerah lingkungannya, arus orang ke daerah-daerah yang pembangunannya lebih cepat dan sebagainya maka yang lebih banyak mengetahuinya adalah pejabat-pejabat pemerintah daerah. Mereka jugalah yang paling mengetahui perihal masalah-masalah pendidikan daerahnya, tingkat pendaftaran masuk sekolah di daerahnya dan sebagainya. Berdasarkan itu maka merekalah yang memiliki kapasitas untuk memberikan ramalan mengenai jumlah anak didik di kemudian hari pada skala lokal.

Selain itu juga, dilihat dari skala nasional dan skala lokal tersebut tentu harus di pertimbangkan secara matang dari berbagai macam faktor terutama lingkungan masyarakat yang berada di lingkungan lembaga pendidikan tersebut yang nantinya akan dipengaruhi oleh kultur sosial termasuk cara pergaulan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan agar dalam menentukan sebuah lokasi

pendidikan dapat terencana dengan baik. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak sesuai dengan keberadaannya. Tidak semua ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan maupun performan dapat dikembangkan oleh sekolah ataupun dalam keluarga karena keterbatasan dana dan kelengkapan lembaga tersebut. Kekurangan yang dirasakan akan dapat diisi dan dilengkapi oleh lingkungan masyarakat dalam membina pribadi anak didik atau individual secara utuh dan terpadu.

Menurut Purwanto (1995:190-192), ada tiga jenis hubungan antara lembaga pendidikan (sekolah) dan masyarakat, yaitu :

1. Hubungan edukatif

Hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru dan orang tua. Hubungan ini mempunyai menghindari perbedaan prinsip yang dapat mengakibatkan sikap ragu dalam kepribadian dan sikap seorang anak. Hubungan kerjasama yang lainnya adalah dengan berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah.

Cara kerjasama itu dapat direalisasikan dengan pertemuan rutin orang tua murid ke sekolah demi membahas masalah murid

yang ada. Dengan adanya hubungan ini, diharapkan pihak sekolah dan orang tua murid dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi murid sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik.

2. Hubungan Kultural

Hubungan Kultural adalah usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah adalah salah satu faktor penentu kemajuan kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, dan adat-istiadat. Sekolah diharapkan mampu menjadi garda depan dalam pembentukan karakter suatu bangsa, menjadi laboratorium bagi kehidupan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan adanya hubungan yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat.

Sekolah yang baik adalah yang mampu menyuguhkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan jaman. Untuk menjalankan hubungan kerja sama ini, sekolah harus mengerahkan murid-muridnya untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial ini berarti mendidik anak-

anak berpartisipasi dan turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

3. Hubungan Institusional

Hubungan Institusional adalah hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintahan, seperti hubungan kerja sama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan pemerintahan, perikanan dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan Negara atau swasta, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak yang nantinya akan hidup sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas bermacam-macam golongan, jabatan, status sosial, dan bermacam-macam pekerjaan, sangat memerlukan adanya hubungan kerjasama. Dengan adanya hubungan ini, sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga-lembaga lain, dan simpati masyarakat akan tumbuh melalui upaya-upaya sekolah dalam menjalin hubungan secara intensif dan proaktif, disamping membangun citra lembaga yang baik.

2. Rekomendasi dalam Pemerataan Pendidikan yang berkaitan dengan Demografi

A. Pendidikan Karakter

Dengan adanya ledakan usia produktif, maka sudah pasti rintangan dan masalah itu ada. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah pendidikan karakter mampu mereduksi permasalahan yang dihadapi oleh usia produktif. Mengingat, tawuran pelajar, tawuran mahasiswa, tawuran warga, miras, narkoba, pornografi, *hoax* dan keberagaman (seolah-olah) menjadi masalah kontekstual. Ditambah lagi masalah korupsi yang tidak pernah berakhir. Jika tidak diselamatkan maka ini akan menjadi bom waktu dan bomerang bagi Indonesia. Karena itu tidak ada jaminan suatu negara dengan banyaknya usia produktif maka serta merta negara itu menjadi negara maju. Malahan bisa juga terjadi bencana demografi bukan bonus demografi. Maka pendidikan karakter harus menjadi penopang bonus demografi ini.

Sebagai langkah awal, kita tentunya harus mengetahui apa itu karakter. Karakter bisa disandingkan dengan istilah etika dan moral yang fokus masalahnya adalah ada pada kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak. Dalam

kamus bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2008: 682) kata karakter bisa diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lainnya. Membangun karakter tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada proses panjang yang dilalui dan memerlukan usaha yang berkesinambungan dari 3 elemen penting pembentuk karakter, yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sosial.

Jika merujuk pada konsep pendidikan karakter yang ditawarkan oleh Lickona (1991: 51) yang meliputi tiga unsur pokok yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Konsep ini, bisa kita dekatkan dan sandingkan bahkan memasukannya dalam elemen keluarga, sekolah dan lingkungan.

Keluarga bisa dikatakan sekolah nonformal. Keluarga sebagai langkah awal pembentuk karakter anak sebelum lingkungan sosial dan sekolah. Di dalam lingkungan keluarga inilah kebaikan inilah kebaikan diajarkan kepada anak. Sehingga mereka mengetahui kebaikan (*knowing the good*). Setelah mengetahui barulah lingkungan keluarga mendorong anak yang mencintai kebaikan (*desiring the good*)

Demikian pula, lingkungan sekolah pun akan melakukan dan harus melakukan hal yang sama. Namun, lingkungan sosial lah yang menjadi aktualisasi dari dimensi karakter yaitu melakukan kebaikan (*doing the good*).

Dalam konteks keindonesiaan, semua nilai karakter yang telah didapatkan dalam pendidikan harus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara agar tidak ada lagi masalah-masalah kontekstual yang muncul dan membahayakan kebinekaan. Penulis mengutip dari buku “*Pendidikan Karakter*” yang ditulis oleh Zuchdi dkk (2015: 26-28) beberapa nilai karakter yang penting dimiliki oleh peserta didik, mahasiswa dan masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu taat kepada tuhan, jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kritis, sinergis, visioner, peduli, ikhlas, adil, sederhana, dan nasionalisme. Adapun interpretasi dari nilai ini, penulis menyerahkan kepada para pembaca sekalian.

Dengan demikian, segala bentuk dan konsep karakter dalam dunia pendidikan harus dimiliki, diresapi, dimaknai, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta generasi yang akan mengisi bonus demografi pada tahun 2020-2030 yang taat kepada tuhan, jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kritis,

sinergis, professional, visioner, peduli, ikhlas, adil, sederhana, dan nasionalis.

B. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Trend Demografi di Indonesia sesungguhnya bisa menjadi manfaat sekaligus juga bisa menjadi musibah apabila pemerintah tidak sigap dalam menyikapi fenomena tersebut. Aspek pendidikan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mempersiapkan persoalan demografi. Diantara kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu mengatasi persoalan demografi diantaranya adalah :

- Pemerataan fasilitas pendidikan di semua daerah
- Penciptaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
- Kualitas tenaga pengajar yang mumpuni dan maksimal
- Penyediaan pelatihan berbasis *life skill*
- Mempelopori riset dan penemuan baru dalam bidang IPTEK di lembaga- lembaga pemerintah.

KESIMPULAN

Persoalan demografi dan pengaruhnya terhadap dunia pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Berbagai macam permasalahan dalam bidang kependudukan secara langsung ataupun tidak langsung juga akan mempengaruhi pada aspek pendidikan. Tingkat perpindahan penduduk misalnya saja saat ini semakin tinggi, dan ini menjadi hal yang dapat mempengaruhi dunia pendidikan. Namun di sisi lain kita perlu juga menyadari bahwa terkadang perpindahan pendudukpun dipengaruhi oleh pendidikan, misalnya saja penduduk berpindah tempat tinggal dikarenakan mencari sekolah atau sarana pendidikan yang berkualitas.

Banyak hal yang dimungkinkan bisa mengatasi persoalan demografi dan pendidikan. Saat ini kita banyak membaca dan mendengar tentang bonus demografi dan juga musibah demografi. Ini sejatinya hanyalah persepektif saja, jika pemerintah mampu mengatasinya dengan baik maka situasi seperti apapun dalam konteks demografi tentu akan menimbulkan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Hal yang tidak mungkin bisa dibendung adalah terjadinya demografi kependudukan, maka yang patut disiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana mendesain kebijakan yang bisa menjadi

solusi terhadap dampak demografi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abin, S. Makmun, dkk. 2001. *Perencanaan Pembangunan Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Arifin. 2007. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Asmendri, Firman. 2015. *Perencanaan Pendidikan Teori Aplikasi Dan Riset*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Basri, Hasan. 2013. *Landasan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Effendi, Sofian, Tri Sucipto, Tukiran, dan Budi Puspo Priyadi. 1990. *Studi Implikasi Sosial Peledakan Penduduk Usia Muda*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, UniversitasGadjahMada
- Fatah, Nanang. 2001. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda
- Matin. 2013. *Perencanaan Pendidikan: Perspektif Proses dan Teknik dalam Penyusunan Rencana Pendidikan*. Depok: Rajagrafindo
- Purwanto, M. Ngalim. 1995. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramat, Abdul. 2014. *Pengantara Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Rizqi Dwi Alfiyanto, *Pengertian Demografi dan Kependudukan*, <http://rakyat-sejahtera.blogspot.com/2013/06/pengertian-demografi-dan-kependudukan.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Sa'ud, S. dan Makmun A, S. 2007. *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Sagala, S. 2009. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sarbini dan Nneneng Lina. 2011. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: pustaka Setia.
- Soemantri, Manap. 2014. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: IPB Pres.
- Soenarya, E. 2000. *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: Adicita.
- Ta Ngoc Chau, 1986. *Aspek-Aspek Demografik Perencanaan Pendidikan*. Penerjemah Dewan Redaksi Bhratara. Penerbit Bhratara Karya Aksara Jakarta dan UNESCO Paris
- Tilaar. H.A.R. 1998. *Manajemen Pendidikan Nasional (Kajian Pendidikan Masa Depan)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Tjiptoherijanto, Priyono. 1989. *Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Usman. 2008. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjoetomo. 2009. *Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta:Gema Insani Press